

Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi pada Desa-Desa di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

Amir Yunus¹, Harun Blongkod², Victorson Taruh³

Program Studi Sarjana Akuntansi FEB Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
amiryunus011@gmail.com, blongkod@ung.ac.id, victorsontaruh@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the Village Financial System (Siskeudes) and human resource competence on the accountability of village fund management. The study was conducted in villages within the Telaga Subdistrict, Gorontalo Regency, Gorontalo Province, employing a quantitative method. Data was collected through questionnaires. The analysis techniques included validity testing, reliability testing, and descriptive analysis. Data collection employed purposive sampling, or sampling with specific criteria, namely villages that have already implemented the Siskeudes application, with a total sample of 120 respondents across nine different villages: Bulila, Mongolato, Luhu, Hulawa, Dulohupa, Pilohayanga, Pilohayanga Barat, Dulamayo Selatan, and Dulamayo Barat, located in Telaga Subdistrict. The data analysis technique employed in this study was Structural Equation Modeling (SEM), which was conducted using the AMOS 24 program. The results of this study show that the village financial system has an influence on the accountability of village fund management. In contrast, human resource competence does not have an influence on the accountability of village fund management. However, both independent variables simultaneously contribute significantly to the accountability of village fund management.

Keywords: *Village Financial System (Siskeudes), Human Resource Competence, Accountability of Village Fund Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem keuangan desa (siskeudes) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi ini dilakukan pada Desa-desanya di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel dengan kriteria tertentu yakni desa-desanya yang sudah menggunakan aplikasi siskeudes dengan total sampel 120 responden di sembilan Desa berbeda yaitu Desa Bulila, Mongolato, Luhu, Hulawa, Dulohupa, Pilohayanga, Pilohayanga Barat, Dulamayo Selatan, Dulamayo Barat, di Wilayah Kecamatan Telaga. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) atau Model Persamaan Struktural yang dioperasikan melalui program AMOS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, secara simultan kedua variabel independen ini berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Indonesia terus memperkuat

regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa melalui pembaruan kebijakan, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan pentingnya tata kelola desa yang lebih profesional dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan dana desa agar dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi tuntutan utama guna mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara optimal.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab pemerintah desa untuk merencanakan, mengalokasikan, dan melaporkan penggunaan dana desa secara transparan, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Kurniasih *et al.*, (2019) akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam tata kelola publik di negara-negara demokratis. Ini berkaitan dengan kewajiban para pejabat publik untuk bertindak dengan jujur, adil, dan memberikan penjelasan serta tanggung jawab atas kinerja mereka kepada masyarakat. Dalam esensinya, akuntabilitas juga melibatkan upaya membangun pemerintahan yang meyakinkan dan dapat dipercaya. Akuntabilitas lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan tapi akuntabilitas juga memastikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, dan bermanfaat. Pemerintahan desa harus fokus pada tujuan utama akuntabilitas, sehingga pengelola keuangan mampu menyajikan informasi yang jelas dan transparan melalui laporan keuangan

Menurut Gibran *et al.*, (2021), akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola untuk menyampaikan laporan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada otoritas terkait. Sejak pemerintah pusat mulai mendistribusikan dana ke seluruh desa di Indonesia, harapan yang muncul adalah agar pemerintah desa dapat mengelola dana tersebut secara optimal. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa dituntut untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana kepada semua pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan agar proses pembangunan desa dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, serta terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana halnya dalam praktik kerja seorang akuntan. Ketika kepala desa diminta mempertanggungjawabkan tindakannya, mereka dapat menetapkan kebijakan keuangan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah desa menjadikan akuntabilitas sebagai acuan dalam mengelola dana publik agar memberikan manfaat nyata bagi warga. Pengelolaan dana tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah desa sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Olivia *et al.*, 2023).

Gulo & Kakisina, (2021), menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Bupati bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku. Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menuntut transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan anggaran. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sistem keuangan

desa yang mampu mencatat dan menyajikan informasi keuangan secara tertib, akurat, dan sesuai standar.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memainkan peran penting dalam memastikan laporan keuangan desa tersusun secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Sebagai sebuah platform, Siskeudes dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan dengan lebih efisien, sehingga pelaporan keuangan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan BPKP (2016), Siskeudes dikembangkan melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bawah Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Implementasi sistem ini dimulai pada tahun 2015 dengan tujuan mempermudah pengelolaan dana desa agar lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut BPKP (2016), keberhasilan implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat diukur melalui berbagai aspek krusial, salah satunya adalah kualitas sistem. Kualitas sistem merujuk pada sejauh mana perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi dapat berfungsi secara optimal. Aspek ini berfokus pada kinerja sistem, yang mencakup kapasitas perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, serta prosedur dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara efektif (DeLone & McLean, 1992). Untuk menilai kualitas sistem ini (Ifinedo, 2006) mengembangkan instrumen evaluasi yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu tingkat keakuratan data yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasi, fleksibilitas sistem dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan sistem, serta fitur-fitur yang mendukung optimalisasi kinerja sistem. Sistem keuangan desa membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat berjalan efektif. Tanpa SDM yang memahami dan menguasai sistem, pengelolaan keuangan desa berisiko tidak akurat dan kurang akuntabel.

Fajri & Julita, (2021) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah kompetensi sumber daya manusia atau aparatur desa. Kompetensi menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh aparat pengelola dana desa agar prinsip akuntabilitas dapat dijalankan secara optimal. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sangat dibutuhkan guna mendukung terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sangat dibutuhkan guna mendukung terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif (Tiarno & Budiwitjacksono, 2023).

Kondisi yang terjadi di desa-desa Kecamatan Telaga mencerminkan adanya ketimpangan antara ekspektasi pemerintah dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan dengan kenyataan di lapangan. Sejumlah desa masih menghadapi hambatan serius dalam mengelola dana desa secara efektif. Dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya menuntut pengelolaan yang akuntabel dari pemerintah desa. Akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan publik, karena menyangkut kepercayaan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dana. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan berbagai permasalahan akuntabilitas di sejumlah desa, termasuk di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Permasalahan tersebut antara lain pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu, kurang transparan, dan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

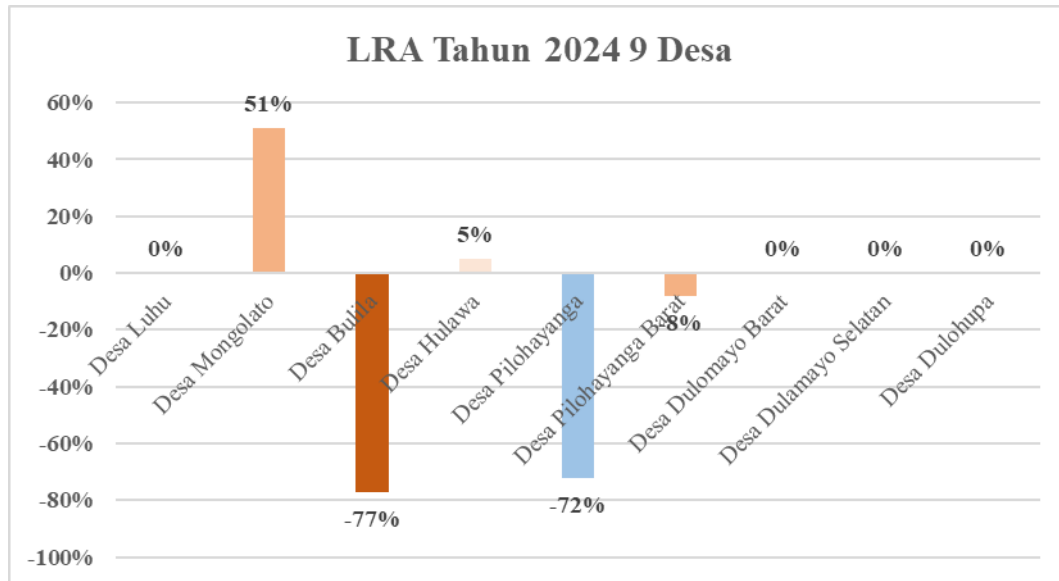
Berdasarkan rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masih terdapat berbagai persoalan yang berpotensi menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertama, desa belum memiliki regulasi yang komprehensif dan terstandar sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa, sehingga proses perencanaan dan penganggaran sering kali tidak berjalan seragam dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penetapan program maupun alokasi anggaran. Kedua, kompetensi aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan, aset, serta pengadaan barang dan jasa masih terbatas. Kondisi ini dapat memengaruhi akurasi perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, hingga kualitas pertanggungjawaban keuangan desa. Ketiga, pembinaan terkait integritas aparat desa masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa aspek etika, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas aparat desa, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan maupun lemahnya disiplin birokrasi. Keempat, keterbatasan tenaga teknis di tingkat desa juga menjadi tantangan. Banyak desa belum memiliki kader teknik yang dapat membantu memastikan kualitas perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan kegiatan fisik, sehingga menghambat efektivitas pembangunan desa. Kelima, pendampingan terhadap pengelola kegiatan di desa belum berjalan optimal. Peran pendamping desa seharusnya menjadi penguat kapasitas aparat desa, namun masih ditemukan kurangnya asistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kegiatan.

Secara keseluruhan, berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dan keuangan desa masih membutuhkan penguatan, baik dari aspek regulasi, kompetensi sumber daya manusia, integritas, dukungan teknis, maupun peran pendampingan. Hal ini penting agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Seluruh kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum optimal, dan hal ini diperkuat oleh data yang ada.

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, diperlukan data yang dapat menunjukkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilaksanakan. Salah satu data yang dapat digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu laporan yang membandingkan antara rencana anggaran dengan pelaksanaan kegiatan di desa. Melalui LRA, kita bisa melihat apakah dana desa telah digunakan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, berikut ini disajikan data persentase laporan realisasi anggaran tahun 2024. Data tersebut mencakup informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja, realisasi anggaran, serta selisih atau deviasi yang terjadi.

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 9 Desa di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

No.	Nama Desa	Pendapatan		Belanja		Deviasi (Rp)		Presentasi Realisasi (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Pendapatan	Belanja	
1	Desa Luhu	Rp 1.818.184.750	Rp 1.721.997.434	Rp 1.818.184.750	Rp 1.682.015.162	Rp -	Rp 39.982.272	0%
2	Desa Mongoloto	Rp 1.499.363.064	Rp 1.228.458.462	Rp 1.613.598.676	Rp 1.286.777.060	Rp 114.235.612	Rp 58.318.588	51%
3	Desa Bulla	Rp 1.580.103.500	Rp 1.439.948.250	Rp 1.621.722.049	Rp 1.407.745.838	Rp 41.618.569	Rp 32.197.412	-77%
4	Desa Hulawa	Rp 1.716.537.144	Rp 1.650.690.453	Rp 1.841.444.175	Rp 1.656.349.257	Rp 124.907.081	Rp 5.658.804	5%
5	Desa Pihoyanga	Rp 1.708.119.980	Rp 1.546.856.438	Rp 1.736.307.275	Rp 1.526.517.307	Rp 28.187.285	Rp 20.339.131	-72%
6	Desa Dulomayo Barat	Rp 1.229.995.260	Rp 1.168.880.501	Rp 1.292.565.813	Rp 1.164.005.426	Rp 62.570.559	Rp 4.873.075	-8%
7	Desa Pihoyanga Barat	-	-	-	-	-	-	-
8	Desa Dulamayo Selatan	-	-	-	-	-	-	-
9	Desa Dulomaya	-	-	-	-	-	-	-



Sumber: LRA 9 Desa.

Berdasarkan gambar grafik persentase LRA tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar desa mengalami deviasi yang signifikan antara anggaran dan realisasi, dengan beberapa desa mencatat persentase negatif, bahkan hingga -77% dan -72%, yang menandakan realisasi belanja jauh lebih rendah dari yang direncanakan. Selain itu, ada pula desa yang menunjukkan realisasi 0%, seperti Desa Pilohayanga Barat, Dulamayo Selatan dan Dulohupa, yang mengindikasikan tidak terlaksananya program atau tidak adanya pelaporan realisasi keuangan.

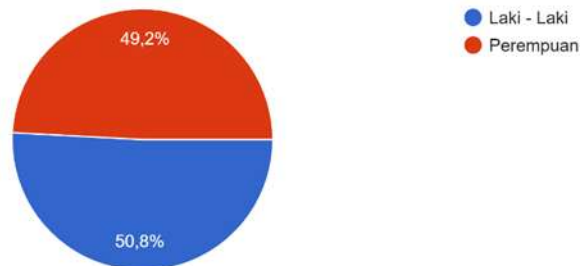
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dimana kuantitatif ini menekankan pada analisis dan pengujian hipotesis penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang valid mengenai hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data berupa angka atau bilangan yang dapat diolah atau dianalisis dengan teknik perhitungan matematika atau statistik (Rinaldi & Mujiyanto, 2017:92). Metode ini melihat hubungan variabel terhadap obyek yang akan diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independent dan dependen. Oleh karena itu dari variabel tersebut dapat dicari seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Penelitian ini yang menjadi variabel independent Sistem Keuangan Desa (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) dengan variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data lapangan yang terkumpul dianalisis secara mendalam. Proses ini mencakup tinjauan profil responden, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif variabel penelitian, penerapan Structural Equation Modeling (SEM), dan pengujian hipotesis langsung maupun tidak langsung.

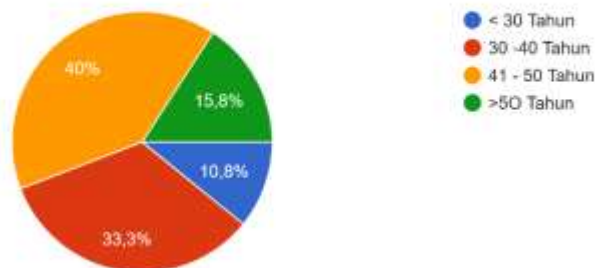
Jenis Kelamin
120 jawaban



Gambar Profil Responden Menurut Jenis Kelamin

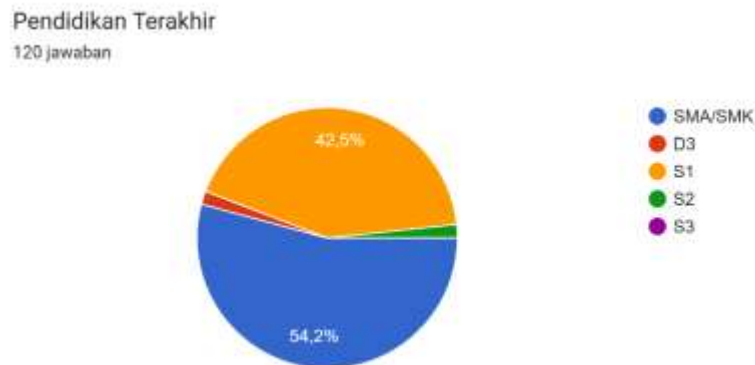
Gambar diatas memperlihatkan bahwa penelitian ini melibatkan 120 responden. Mayoritas responden adalah laki-laki, mencapai 50,8% (61 orang). Sementara itu, responden perempuan menyumbang 49,2% (59 orang) dari total sampel. Laki-laki menjadi kelompok yang paling banyak dalam komposisi sampel ini.

Usia
120 jawaban



Gambar Profil Responden Berdasarkan Umur

Menurut Gambar diatas sebagian besar responden berada dalam rentang usia 41-50 tahun, yang mencakup 40% dari total responden atau sebanyak 48 orang. Kelompok usia 30-40 tahun mengikuti dengan persentase 33,3%, yang berarti ada 40 orang dalam kategori ini. Kemudian untuk usia >50 tahun dengan presentase 15,8% yang respondennya 19 orang. Sementara itu, responden dalam kelompok usia <30 tahun merupakan yang paling sedikit, dengan persentase 10,8% atau sebanyak 13 orang.



Gambar Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan Gambar diatas sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan terakhir di tingkat SMA/SMK/MA, yang mencapai 54,2% dari total responden atau sebanyak 65 orang. Di posisi kedua, responden dengan latar belakang pendidikan S1 (Sarjana) menyumbang 42,5% atau sebanyak 51 orang. Selanjutnya, responden yang berpendidikan D2/D3 (Diploma) dan pendidikan S2 (Magister) memiliki presentase yang sama mencakup 1,7% atau 2 orang dari masing-masing hasil tersebut.

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana alat ukur dapat menggambarkan konsep, fenomena, atau kejadian yang ingin diukur dengan tepat. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner memiliki tingkat keabsahan yang memadai. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika dapat menggambarkan atau mengukur secara akurat apa yang ingin diteliti

1. Uji Validasi Variabel Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Tabel Hasil Perhitungan Validitas Variabel Sistem Keuangan Desa X₁

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	2	3	4	5	6
1.	Sistem Keuangan Desa (X ₁)	X1.1	0,647	>0,5	Valid
		X1.2	0,654	>0,5	Valid
		X1.3	0,673	>0,5	Valid
		X1.4	0,707	>0,5	Valid
		X1.5	0,533	>0,5	Valid
		X1.6	0,571	>0,5	Valid
		X1.7	0,665	>0,5	Valid
		X1.8	0,660	>0,5	Valid
		X1.9	0,679	>0,5	Valid
		X1.10	0,675	>0,5	Valid
		X1.11	0,661	>0,5	Valid
		X1.12	0,710	>0,5	Valid
		X1.13	0,678	>0,5	Valid

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
		X1.14	0,604	>0,5	Valid
		X1.15	0,655	>0,5	Valid

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Analisis uji validitas terhadap item-item kuesioner mengindikasikan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel sistem keuangan desa (SISKEUDES) memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5. Nilai ini ditetapkan sebagai kriteria minimum agar suatu item kuesioner penelitian dapat dianggap layak untuk digunakan (dapat diterima). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner untuk variabel sistem keuangan desa memenuhi standar validitas dan dapat diaplikasikan sebagai instrumen pengukuran variabel yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Uji Validasi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tabel Hasil Perhitungan Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2					
No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	2	3	4	5	6
1.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	X2.1	0,601	>0,5	Valid
		X2.2	0,676	>0,5	Valid
		X2.3	0,687	>0,5	Valid
		X2.4	0,669	>0,5	Valid
		X2.5	0,546	>0,5	Valid
		X2.6	0,574	>0,5	Valid
		X2.7	0,656	>0,5	Valid
		X2.8	0,649	>0,5	Valid
		X2.9	0,738	>0,5	Valid
		X2.10	0,656	>0,5	Valid

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Analisis uji validitas terhadap item-item kuesioner mengindikasikan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5. Nilai ini ditetapkan sebagai kriteria minimum agar suatu item kuesioner penelitian dapat dianggap layak untuk digunakan (dapat diterima). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner untuk variabel kompetensi sumber daya manusia memenuhi standar validitas dan dapat diaplikasikan sebagai instrumen pengukuran variabel yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Uji Validasi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tabel Hasil Perhitungan Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	2	3	4	5	6

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0,594	>0,5	Valid
		Y.2	0,661	>0,5	Valid
		Y.3	0,693	>0,5	Valid
		Y.4	0,685	>0,5	Valid
		Y.5	0,720	>0,5	Valid
		Y.6	0,640	>0,5	Valid
		Y.7	0,680	>0,5	Valid
		Y.8	0,570	>0,5	Valid
		Y.9	0,619	>0,5	Valid
		Y.10	0,729	>0,5	Valid
		Y.11	0,482	>0,5	Invalid

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Hasil uji validitas item kuesioner menunjukkan bahwa ada 1 item pernyataan dalam masing-masing variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai *loading factor* di bawah 0,5, sehingga dilakukan penghapusan (*dropout*) item tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan hanya item-item yang memenuhi standar batas minimal validitas yang digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian validitas item kuesioner setelah proses penghapusan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Dropout Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	2	3	4	5	6
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0,594	>0,5	Valid
		Y.2	0,661	>0,5	Valid
		Y.3	0,693	>0,5	Valid
		Y.4	0,685	>0,5	Valid
		Y.5	0,720	>0,5	Valid
		Y.6	0,640	>0,5	Valid
		Y.7	0,680	>0,5	Valid
		Y.8	0,570	>0,5	Valid
		Y.9	0,619	>0,5	Valid
		Y.10	0,729	>0,5	Valid

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Setelah dilakukan (*dropout*), hasil pengujian validitas kuesioner menunjukkan bahwa semua item pertanyaan atau pernyataan dalam setiap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5, yang merupakan batas minimal agar suatu item kuesioner dianggap valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item-item kuesioner untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	Alpha Cronbach's	Alpha Toleransi	Status Item
1.	Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X1)	0,789	0,6	Reliabel
2.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,877	0,6	Reliabel
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,878	0,6	Reliabel

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi standar reliabilitas, karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6 ($\alpha \geq 0,6$) sebagaimana diungkapkan oleh Sunyoto (2009). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini layak digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti, dengan tingkat konsistensi yang melebihi batas minimum yang ditetapkan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai korelasi antar variabel eksogen. Model dapat dianggap bebas dari multikolinearitas apabila nilai korelasi antara variabel eksogen kurang dari 0,9.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas Correlations: (Group Number 1 – Default Model)

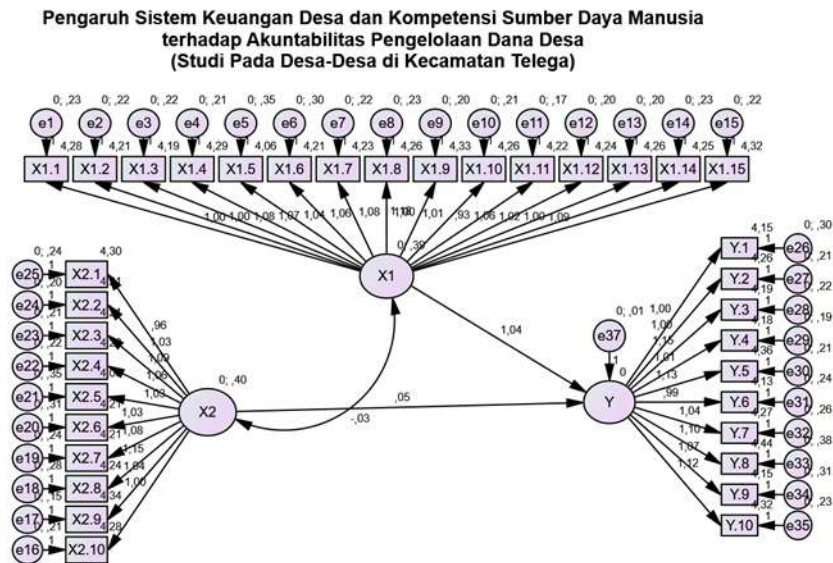
	Estimates
X.1<--> X.2	0,068

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel eksogen sebesar 0,068. Nilai ini berada di bawah ambang batas 0,9, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dianalisis.

Uji Parsial

Pembahasan hasil temuan penelitian dilakukan dengan mengacu pada kondisi nyata yang dihadapi responden di lapangan, serta dengan membandingkan beberapa teori dan jurnal ilmiah yang dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian, sebagai berikut:



Gambar 4. 12 Koefisien t-hitung Full Model_2

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan pertanggungjawaban dalam setiap proses pengelolaan anggaran desa.

Berdasarkan tanggapan responden, indikator dengan penilaian paling tinggi adalah frekuensi penggunaan pada dimensi penggunaan. Tingginya penilaian pada indikator ini menunjukkan bahwa aparat desa telah terbiasa memanfaatkan sistem dalam aktivitas administrasi keuangan sehari-hari. Indikator selanjutnya yang memperoleh apresiasi tinggi adalah efisiensi operasional pada dimensi dampak organisasi. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan sistem mampu mempercepat proses kerja, menghemat waktu, dan mengurangi beban administratif perangkat desa. Selain itu, kemudahan penggunaan pada dimensi kualitas sistem juga dinilai tinggi oleh responden. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan dan fitur sistem mudah dipahami sehingga meminimalkan hambatan teknis dan membantu meningkatkan kinerja aparatur.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sedana dan Putra (2023), yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa secara langsung meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Tiarno dan Budiwitjacksono (2022) juga mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa Sistem Keuangan Desa berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan di tingkat desa.

Jika dikaitkan dengan *grand theory Good Governance* menurut Mkandawire (2007), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa secara langsung mendukung prinsip-prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan

keterbukaan informasi publik tercermin dari bagaimana sistem ini digunakan di desa-desa Kecamatan Telaga.

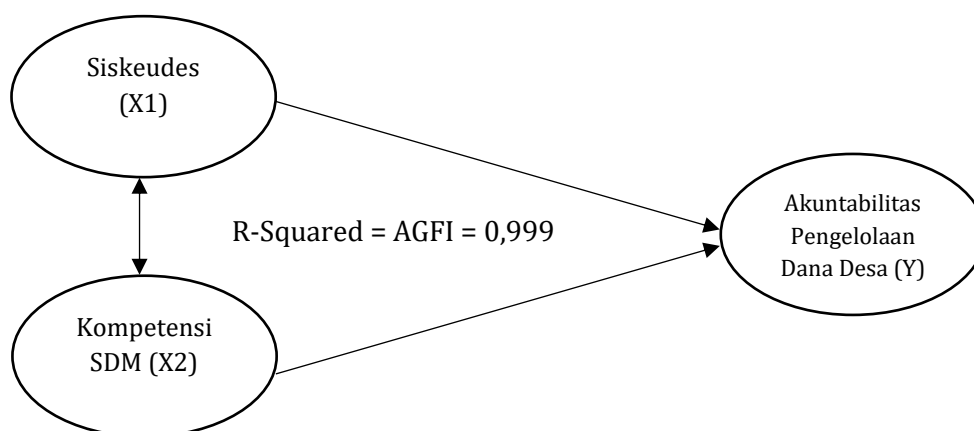
Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia aparatur desa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan tanggapan responden, indikator dengan penilaian paling rendah meskipun masih berada dalam kategori baik adalah pemahaman terhadap prosedur pekerjaan dalam dimensi pengetahuan, pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam dimensi pengetahuan, keterampilan teknis dalam dimensi keterampilan, dan kepemilikan sertifikat keterampilan kerja dalam dimensi keterampilan. Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang memperoleh penilaian sangat tinggi dari responden, yaitu keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan pada dimensi keterampilan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan pada dimensi sikap, serta kesesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan pada dimensi pengetahuan. Penilaian ini menunjukkan bahwa secara umum aparatur desa memiliki kemampuan teknis yang cukup baik, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan kerja, dan memiliki pendidikan yang relevan dengan tugasnya. Namun, tingginya penilaian pada indikator-indikator ini tidak serta merta menghasilkan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggraeni dan Yuliani (2020) serta penelitian Nurkhasanah (2019), yang sama-sama menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan akuntabilitas lebih banyak dipengaruhi oleh sistem, regulasi, prosedur kerja, dan mekanisme pengawasan, bukan semata-mata kompetensi individu. Hasil tersebut konsisten dengan kondisi aparatur desa di Kecamatan Telaga yang memiliki kompetensi dasar namun belum mencapai tingkat kemampuan profesional yang mampu mendorong peningkatan akuntabilitas secara langsung. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Muliati *et al.*, (2020) serta penelitian Afifi *et al* (2021) yang menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Jika dikaitkan dengan teori *Good Governance* menurut Mkandawire (2007), kompetensi aparatur desa merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Good Governance* menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

Uji Simultan



Gambar 4. 13 Koefisien thitung *Full Model_2*

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Sistem Keuangan Desa dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengaruh signifikan kedua variabel tersebut tidak terlepas dari pola jawaban yang diberikan responden. Responden memberikan penilaian yang tinggi pada aspek frekuensi penggunaan, kemudahan penggunaan, serta efisiensi operasional dalam Sistem Keuangan Desa. Penilaian ini menunjukkan bahwa aparat desa benar-benar memanfaatkan sistem secara kontinu, memahami menu dan fitur yang tersedia, serta merasakan manfaat nyata dalam percepatan dan ketepatan proses administrasi keuangan.

Di sisi lain, penilaian responden terhadap kompetensi SDM juga menunjukkan kecenderungan positif, terutama dalam hal pemahaman tugas, kemampuan teknis, dan kecakapan dalam mengelola laporan keuangan. Tingginya tingkat kompetensi ini memperkuat implementasi sistem sehingga hasil kerja menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, jawaban responden memberikan gambaran bahwa kedua variabel saling mendukung dan berkontribusi langsung terhadap tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Sedana dan Putra (2023) menemukan bahwa pemanfaatan Sistem Keuangan Desa yang didukung oleh kompetensi aparatur secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kedua variabel bekerja secara simultan dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas.

Sejalan dengan penelitian Sari et al., (2022) juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan kecakapan teknis dalam menggunakan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Mereka menjelaskan bahwa aparatur desa yang memahami tugas administrasi dan prosedur pengelolaan dana desa cenderung lebih patuh terhadap regulasi, sehingga tingkat akuntabilitas menjadi semakin tinggi.

Temuan penelitian ini sangat relevan jika dilihat dari perspektif teori *Good Governance* menurut Mkandawire (2007). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan efisiensi, dapat terwujud apabila pemerintah desa memiliki sistem pengelolaan yang baik sekaligus didukung oleh

sumber daya manusia yang kompeten. Sistem Keuangan Desa berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat transparansi dan ketertiban administrasi, sementara kompetensi SDM berperan sebagai penggerak utama yang memastikan sistem tersebut digunakan secara benar dan konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Keuangan Desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem yang mudah digunakan, sering dioperasikan, dan mampu meningkatkan efisiensi kerja telah mendorong keteraturan administrasi serta meningkatkan transparansi dan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan sistem ini membantu meminimalkan kesalahan manual dan memperkuat mekanisme pengendalian internal, sehingga menciptakan proses pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi SDM terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memahami tugas, memiliki kemampuan teknis, dan mampu menjalankan prosedur pengelolaan keuangan dengan baik memberikan dampak langsung pada kualitas administrasi keuangan desa. Semakin baik kompetensi yang dimiliki aparat, semakin tinggi pula akurasi dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan.

3. Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Secara simultan, Sistem Keuangan Desa dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterpaduan antara sistem yang baik dan kemampuan aparat untuk mengoptimalkan penggunaan sistem menjadi faktor kunci tercapainya tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Sistem berfungsi sebagai alat yang memastikan keterbukaan dan keteraturan proses, sedangkan kompetensi SDM memastikan bahwa alat tersebut digunakan secara tepat dan konsisten. Kombinasi keduanya sesuai dengan prinsip *Good Governance* menurut Mkandawire (2007), yang mengutamakan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah saran yang disarankan oleh peneliti:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - i. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa
Pemerintah desa perlu memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dijalankan menggunakan Sistem Keuangan Desa secara konsisten. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi

- kendala teknis dan mendorong pemanfaatan sistem secara lebih optimal.
- ii. Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa
Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa terkait penggunaan sistem, pemahaman regulasi keuangan desa, penyusunan laporan keuangan, dan penguatan kemampuan teknis lainnya. Pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aparatur agar kompetensi meningkat secara efektif.
 - iii. Penyediaan Sarana Teknologi yang Memadai
Pemerintah desa perlu memastikan fasilitas teknologi—seperti komputer, jaringan internet stabil, dan perangkat pendukung lainnya—berfungsi baik untuk menunjang pemanfaatan Sistem Keuangan Desa secara maksimal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- i. Pengembangan Variabel Penelitian
Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti pengawasan internal, integritas aparatur, budaya organisasi, atau partisipasi masyarakat untuk memberikan gambaran lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - ii. Perluasan Lokasi Penelitian
Penelitian dapat dilakukan pada daerah atau kabupaten lain untuk mengetahui apakah hasil penelitian tetap konsisten dalam konteks wilayah yang berbeda.
 - iii. Penggunaan Metode Penelitian yang Berbeda
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran untuk menggali secara lebih mendalam praktik penggunaan Sistem Keuangan Desa dan dinamika kompetensi aparatur dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Z., Mulyanto, & Nugroho, D. H. (2021). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 111–117. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/5838%0Ahttps://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/download/5838/2695/>
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*, 266–284.
- Boshoff, C., & Arnolds, C. (1995). Some antecedents of employee commitment and their influence on job performance: A multi foci study. *South African Journal of Business Management*, 26(4), 125–135. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v26i4.832>
- BPKP. (2016). Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

- Cahyono, D. P., & Indartuti, E. (2022). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Praja*, 2(05), 5–24. file:///C:/Users/hp/Downloads/PENERAPAN+PRINSIP+GOOD+GOVERNANCE.pdf
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95. <https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Hartono, J. (2007). *Sistem informasi keperilakuan*.
- Hidayat, S. (2016). Komparasi Algoritma Random Forest Dan Decision Tree Untuk Memprediksi Keberhasilan Immunotherapy. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 151–165.
- Ifinedo, P. (2006). Acceptance and Continuance Intention of Web-based Learning Technologies (WLT) Use among University Students in a Baltic Country. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 23(1), 1–20. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00151.x>
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 185–198. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/2302>
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S. (2019). The role of stakeholders in the Accountability of Village Enterprise Management: A Public Governance Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 255(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/255/1/012056>
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik. *Umsida Press*, August, 1–87.
- Muliati, N. K., Yuliantari, N. P. Y., & Sugiantari, N. K. D. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Perangkat Desa, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Tabanan. *Edisi Februari 2021*, 23–32.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Magelang*, 53(9), 1689–1699.
- Olisah, Denny, H., & Irma, P. (2019). ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR. 5, 149–

156.

- Putri, R., & Khairul. (2024). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Badan Keuangan Kota Bukittinggi*. 4(5).
- Sakdiah, A. A., Aiyub, A., & Adnan, A. (2023). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Desa di Kec.Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara). *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 116. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.8198>
- Sari, N. K. N., Padnyawati, K. D., & Yuliantari, N. P. Y. (2022). *Pengaruh Kompetensi SDM, Implementasi Sistem Keuangan Desa, Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas*. *April*, 143–148.
- Sedana, I. D. G. Y., & Putra, I. M. E. L. (2023). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Keuangan Desa, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 114–123.
- Sukaria, T. (2020). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Akuntabilitas Sektor Publik*.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- Watu, D., Londa, Y., & Sayang, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(2), 107–118. <https://doi.org/10.37478/jria.v4i2.3908>
- Widyarini, N. W. W., & Wati, N. W. A. E. (2021). *Pengaruh Sistem Pelaporan, Audit Kinerja, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 152–166. Bibliography